

Quality Management System Design for KAP MNL Aligned with SMM 1 Requirements

Naura Chairunnisa Hasri¹

Nureni Wijayati²

^{1,2}Master of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences: naura.chairunnisa@ui.ac.id

ABSTRACT

This study evaluates the preparedness and efficacy of executing the Quality Management System (SMM 1/ISQM 1) in a Public Accounting Firm by assessing quality hazards, reviewing documentation, and analyzing policy implementation. The findings reveal that although numerous elements of the quality management system are well documented, some areas – especially information systems and communication – fall short of the acceptable standard and necessitate significant enhancement. The documentation assessment indicates a preparedness level of around 71%, while the evaluation of the information system attains just 47%, underscoring a substantial disparity between policy and practice. The report recommends a more complete quality control system design in accordance with SMM 1 to enhance governance, risk assessment procedures, resource proficiency, and monitoring mechanisms. This proposed framework aims to improve the quality of audit engagements and assist the firm in constantly adhering to professional standards.

Keywords: SMM 1, Quality Management System, Quality Risk, Audit Quality Control, ISQM 1

Perancangan Sistem Manajemen Mutu pada KAP MNL Berbasis Standar SMM 1

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tingkat kesiapan dan efektivitas penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM 1) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) MNL melalui penilaian risiko mutu, evaluasi dokumentasi, serta pemeriksaan implementasi kebijakan yang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian komponen sistem mutu telah terdokumentasi dengan baik, namun beberapa area terutama sistem informasi dan komunikasi, masih belum memenuhi ketentuan standar dan memerlukan perbaikan signifikan. Penilaian terhadap dokumentasi menghasilkan tingkat kesiapan sekitar 71%, sementara evaluasi sistem informasi hanya mencapai 47%, menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merancang sistem pengendalian mutu berbasis SMM 1 yang lebih komprehensif untuk memperkuat tata kelola, proses penilaian risiko, kompetensi sumber daya, serta mekanisme pemantauan. Rancangan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu perikatan audit dan membantu KAP memenuhi tuntutan standar profesional secara konsisten.

Kata Kunci: SMM 1, Sistem Manajemen Mutu, Risiko Mutu, Pengendalian Mutu Audit

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 36 No. 1
Denpasar, 31 Januari 2026
Hal. 227-238

DOI:
10.24843/EJA.2026.v36.i01.p01

PENGUTIPAN:

Hasri, C. N., & Wijayati, N. (2026). Perancangan Sistem Manajemen Mutu pada KAP MNL Berbasis Standar SMM 1. *E-jurnal Akuntansi*, 36(1), 227-238

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
15 Oktober 2025
Artikel Diterima:
4 Januari 2026

INTRODUCTION

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang menyediakan layanan utama berupa jasa assurance, yang hasil kerjanya digunakan secara luas oleh berbagai pihak berkepentingan dan masyarakat umum. Profesi ini memainkan peran penting dalam mewujudkan perekonomian negara yang transparan, sehat, dan efisien melalui penyediaan informasi keuangan yang berkualitas tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, seseorang disebut sebagai Akuntan Publik jika dia memiliki izin resmi untuk memberikan jasa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki izin usaha resmi. Di Indonesia, profesi Akuntan Publik dan KAP berada di bawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebuah organisasi profesi tingkat nasional yang memiliki otoritas dalam melakukan peninjauan mutu atas anggotanya. Dalam menjalankan fungsinya, Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang merupakan kumpulan standar teknis yang dikodifikasi secara sistematis.

Menurut informasi yang ditemukan di situs web resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), 16 KAP dikenakan sanksi pembekuan izin dari tahun 2024 hingga 2027 karena melanggar peraturan profesi akuntan publik. Di Indonesia, misalnya, tanggung jawab KAP untuk memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dipertanyakan. Ini terutama terjadi ketika laporan keuangan yang telah diaudit tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kasus yang sangat terkenal mengenai opini yang diberikan oleh auditor adalah SNP Finance dan Garuda Indonesia. Pada kasus SNP Finance Auditor yang terdiri dari Marlina Syamsul, Akuntan Publik, dan firma Deloitte, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah memberikan opini audit yang menyesatkan dan tidak menjelaskan kondisi keuangan yang sebenarnya (CNBC Indonesia, 2018). Tidak berbeda dengan kasus SNP Finance, pada Garuda Indonesia Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur audit terhadap standar akuntansi oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, anggota jaringan BDO International (CNBC Indonesia, 2019). Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan publik memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kredibilitas dan keandalan laporan keuangan yang digunakan oleh regulator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Pisani (2022) yang menyatakan bahwa skandal yang sering terjadi di industri akuntansi dan audit merusak kepercayaan publik terhadap profesi auditor dan integritas pelaksanaannya. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa kegagalan atau penyimpangan besar sering menyebabkan perhatian serius terhadap kualitas audit.

Kantor Akuntan Publik sangat bergantung pada Sistem Pengendalian Mutu (SPM) untuk menjaga kualitas hasil audit. Kantor akuntan publik menggunakan Standar Pengendalian Mutu, yang merujuk pada Standar Profesional Akuntan Publik oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagai pedoman untuk mengelola kualitas layanan yang mereka berikan. Pengendalian

mutu sendiri, juga dikenal sebagai pengendalian mutu, adalah suatu kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan telah sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini dijalankan berdasarkan standar atau pedoman tertentu. Menurut Arens *et al.* (2017), sistem pengendalian mutu untuk kantor akuntan publik (KAP) mencakup berbagai metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor tersebut memenuhi tanggung jawab profesionalnya terhadap klien dan pihak lain. Metode-metode ini mencakup struktur organisasi KAP serta prosedur operasional yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, suatu KAP dapat memiliki struktur organisasi yang mengharuskan setiap tugas direvisi secara teknis oleh partner yang berpengalaman dalam industri klien tersebut. Menurut standar audit, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Standar tersebut juga menyadari bahwa sistem pengendalian mutu hanya dapat memberikan jaminan yang wajar—atau keyakinan yang wajar—bahwa seluruh standar profesional telah diterapkan dengan benar.

Nwaobia *et al.* (2016) menemukan bahwa standar manajemen mutu yang diterapkan pada tingkat tim audit dan kantor akuntan publik memerlukan perubahan pada praktik audit dan budaya kerja saat melakukan audit. Salah satu tren yang baik adalah para penyusun standar lebih memperhatikan praktik audit skala kecil. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan bahwa per tanggal 31 Desember 2025, Standar Pengendalian Mutu 01 (SPM 01) akan digantikan secara resmi oleh Standar Manajemen Mutu 1. SMM 1 ini memiliki tujuan yaitu untuk mengatur mengenai bagaimana KAP dalam mengelola mutu, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu. perbedaan SMM 1 dengan SPM 1 adalah:

Tabel 1. Perbedaan SPM 1 dan SMM 1

Fitur	SPM 1 (Standar Pengendalian Mutu)	SMM 1 (Standar Manajemen Mutu 1)
Filosofi	Berbasis pada kontrol dan prosedur untuk memastikan mutu.	Berbasis risiko, proaktif, dan terintegrasi dalam seluruh sistem manajemen mutu.
Fokus Utama	Pengendalian mutu untuk perikatan audit, reviu, dan asurans.	Memastikan kualitas perikatan secara keseluruhan melalui pendekatan berbasis risiko.
Penilaian Risiko	Hanya menekankan pada pengendalian mutu dalam pelaksanaan perikatan.	Mewajibkan KAP untuk memiliki proses penilaian risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko terhadap mutu.
Peran Kepemimpinan	Kurang ditekankan secara eksplisit.	Sangat menekankan pada peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas untuk membangun budaya mutu yang kuat.
Sistem Informasi	Tidak ada penekanan spesifik.	Menekankan pentingnya sistem informasi untuk mengukur dan mengumpulkan data terkait pengelolaan kualitas.

Sumber: Data Penelitian, 2025

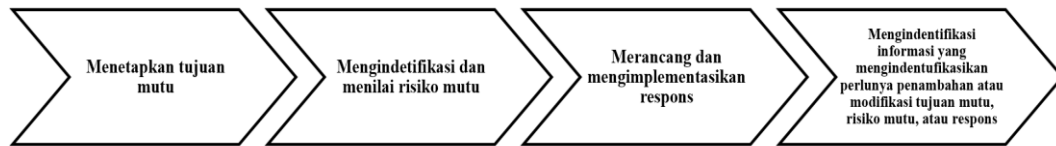
Standar audit memerlukan auditor untuk memahami entitas, lingkungan bisnis, kerangka pelaporan, dan pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Meskipun banyak risiko sulit diukur dan memerlukan pertimbangan profesional, pemahaman ini membantu auditor dalam menentukan risiko bisnis dan kemungkinan kesalahan penyajian. Auditor harus membatasi risiko audit dengan mempertimbangkan konsekuensi kesalahan dan biaya perluasan prosedur audit karena risiko audit sendiri mencerminkan kemungkinan auditor memberikan opini yang salah. Penilaian risiko dimulai dengan menilai risiko intrinsik dan kemungkinan salah saji material pada perusahaan klien. Menurut Leung *et al.* (2024) risiko audit mengacu pada kemungkinan auditor memberikan pendapat yang tidak akurat dalam kasus di mana laporan keuangan sebenarnya mengandung salah saji informasi yang signifikan. Auditor membatasi tingkat risiko yang dapat diterima untuk memastikan bahwa opini yang diberikan akurat. Pembatasan ini mempertimbangkan dua hal penting: kemungkinan kerugian atau konsekuensi akibat opini yang salah, dan biaya tambahan yang diperlukan untuk memperluas prosedur audit untuk mengurangi risiko.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan standar manajemen mutu audit global, khususnya setelah penerapan ISQM 1, menimbulkan tantangan signifikan bagi kantor akuntan publik skala kecil dan menengah Pisani (2022) menyoroti ketidaksesuaian antara desain standar dan realitas operasional SMPs yang dibatasi oleh sumber daya dan kurangnya dukungan regulator, sementara Lubenchenko *et al.* (2022) menjelaskan perubahan fundamental manajemen mutu berbasis risiko namun tanpa panduan implementasi yang sesuai untuk firma kecil-menengah. Studi Tran & Nguyen (2023) menegaskan manfaat dan kendala transisi menuju ISQM 1 di tingkat nasional tetapi tidak mengembangkan model implementasi pada level firma. Di sisi lain, Kritzinger & Barac (2025) berfokus pada pengukuran budaya mutu internal, dan Lapitkaia (2023) menyoroti isu etika dalam digitalisasi, namun keduanya tidak menyentuh aspek desain sistem manajemen mutu yang komprehensif.

Berdasarkan telaah tersebut, tampak adanya gap penelitian yang jelas, yaitu belum adanya kajian yang secara langsung merancang Sistem Manajemen Mutu berdasarkan standar SMM 1 yang dapat diterapkan pada satu KAP dengan mempertimbangkan kondisi riil, kapasitas sumber daya, serta kesiapan organisasi. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas tantangan, manfaat, atau aspek budaya dan etika, tetapi belum menghasilkan model operasional yang aplikatif dan terukur sebagai panduan penerapan standar mutu di tingkat firma. Oleh karena itu, penelitian mengenai perancangan SMM 1 untuk KAP MNL memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengisi kekosongan tersebut dan menyediakan kerangka sistem mutu yang relevan bagi KAP skala menengah.

Pendekatan berbasis risiko memungkinkan KAP untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu dengan kondisi khusus KAP dan perikatannya. Selain itu, metode ini memungkinkan KAP untuk mengelola mutu dengan lebih baik dengan berkonsentrasi pada elemen-elemen yang paling penting sesuai dengan sifat dan kondisi KAP dan perikatannya. SMM 1 mewajibkan KAP untuk membuat prosedur penilaian risiko untuk menetapkan sasaran mutu,

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko mutu, dan merancang dan menerapkan strategi untuk menanggapi risiko. Selain itu, standar ini mengatur prosedur prosedur, yang meliputi:



Sumber: IAPI, 2024

Gambar 1. Proses Penilaian Risiko Mutu

Penelitian ini menganalisis penerapan Standar Manajemen Mutu 1 (SMM 1) pada KAP MNL dengan melihat seberapa siap kantor untuk menerapkan standar tersebut pada bagian penilaian risiko serta merancang sistem pengendalian mutu yang berfokus pada topik yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan KAP MNL dan menyusun rancangan pengendalian mutu berbasis penilaian risiko. Matriks dan Toolkit IAPI 2025 digunakan untuk melakukan penilaian risiko, yang mencakup etika, tata kelola dan kepemimpinan, sumber daya, pelaksanaan perikatan, penerimaan dan keberlanjutan klien dan perikatan tertentu, serta informasi dan komunikasi.

METODE PENELITIAN

Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kesiapan KAP MNL untuk menerapkan Standar Manajemen Mutu 1 (SMM 1) dan merancang sistem pengendalian mutu yang memenuhi persyaratan standar tersebut, terutama dalam hal aspek penilaian risiko. Sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2018), studi kasus adalah metode yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk meninjau fenomena dalam konteks dunia nyata. Mereka mengatakan bahwa metode ini cocok ketika batas antara fenomena dan lingkungannya sulit untuk dipisahkan. Dengan dasar ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana KAP MNL menangani tuntutan penerapan SMM 1, yang akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menemukan penguatan sistem yang diperlukan untuk memastikan implementasi standar tersebut secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan data primer dan pendukung yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Untuk mendapatkan data utama, auditor dari berbagai jenjang – partner, manajer, senior, dan junior – diwawancarai secara menyeluruh. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang persepsi, pengalaman, dan tingkat pemahaman auditor terhadap kesiapan KAP MNL untuk menerapkan SMM 1. Selain itu, penelitian menggunakan dokumen kertas kerja audit dari tiga klien KAP MNL untuk tahun buku 2024 sebagai data teks yang mendukung proses analisis. Dengan menggunakan dokumen ini, peneliti dapat secara langsung mengevaluasi bukti praktik audit yang telah dilakukan dan kesesuaiannya dengan persyaratan standar.

Dalam penelitian ini, semua auditor dari dua belas kantor KAP MNL yang terletak di berbagai kota di Indonesia dimasukkan. Namun, penelitian ini hanya melibatkan tiga kantor besar karena volume pekerjaan audit yang tinggi,

keragaman klien, dan kompleksitas penugasan. Pemilihan ini dilakukan untuk memastikan sampel yang digunakan dapat lebih akurat menunjukkan kondisi KAP MNL secara keseluruhan. Akibatnya, peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kesiapan organisasi untuk menerapkan SMM 1 di seluruh kantor cabang.

Instrumen evaluasi utama yang dibuat oleh IAPI adalah Matriks Penilaian SMM 1, yang digunakan untuk melakukan analisis penelitian. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian terhadap persyaratan standar, setiap komponen matriks dibandingkan dengan bukti pada dokumen pendukung. Pengujian ini menggunakan skala dummy, dengan nilai 1 menunjukkan sangat sesuai, 0,5 menunjukkan sebagian sesuai, dan 0 menunjukkan tidak sesuai.

Tabel 2. Kriteria Penilaian

Deskripsi	Nilai
Sangat sesuai dengan kriteria risiko SMM 1	1
Sebagian ditemukan tapi sudah sesuai dengan kriteria SMM 1	0,5
Tidak sesuai dengan kriteria risiko SMM 1	0

Sumber: data penelitian

Untuk secara objektif menggambarkan tingkat pemenuhan masing-masing indikator, hasil evaluasi kemudian dikonversi ke dalam persentase dengan rumus:

$$\frac{\text{hasil point yang didapatkan}}{\text{total point pada pemeriksaan}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesiapan KAP MNL untuk menerapkan SMM 1 dan memberikan dasar yang kuat untuk membangun rancangan sistem pengendalian mutu yang lebih efisien, terorganisir, dan sesuai dengan standar audit internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen kepemimpinan dan manajemen KAP MNL memenuhi kriteria SMM 1 dan memiliki tingkat kesesuaian sebesar 94%, yang diperoleh dari perhitungan:

$$\frac{\text{hasil point yang didapatkan}}{\text{total point pada pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{15,5}{16} \times 100\% = 94\% \dots\dots\dots (2)$$

Nilai ini menggambarkan bahwa budaya mutu telah tertanam kuat di seluruh lingkungan organisasi. Setiap anggota staf menyadari bersama betapa pentingnya mempertahankan kualitas audit, menerapkan prosedur yang berorientasi pada kepentingan publik, dan mempertahankan etika profesional. Proses pengambilan keputusan strategis, kebijakan operasional, dan pengelolaan sumber daya yang mendukung keberlangsungan sistem manajemen mutu juga menunjukkan integrasi nilai mutu.

Selain itu, penerapan prinsip *tone at the top* yang konsisten mencerminkan komitmen pimpinan terhadap mutu. Dalam wawancara dengan rekan kerja, para pemimpin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya membuat kebijakan yang berorientasi pada kualitas tetapi juga tetap independen dan mematuhi standar profesi. Hasil ini sejalan dengan paragraf 28 SMM 1, yang menekankan bahwa setiap KAP harus menetapkan tujuan mutu pada aspek tata kelola dan kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas

sistem manajemen mutu. Oleh karena itu, tata kelola dan kepemimpinan telah berperan sebagai dasar yang sangat penting dalam mendukung kesiapan KAP MNL untuk menerapkan SMM 1.

Berbeda dengan Tata kelola, Hasil perhitungan pada Ketentuan Etika yang Relevan skala penilaian sebesar 75% dengan perhitungan:

$$\frac{\text{hasil point yang didapatkan}}{\text{total point pada pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{4,5}{6} \times 100\% = 75\% \dots\dots\dots (3)$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa KAP MNL telah menerapkan ketentuan etika yang relevan sesuai dengan standar dalam SMM 1. Tingkat kesesuaian ini diperoleh dengan membandingkan kebijakan internal, dokumentasi kepatuhan, dan praktik etika dengan Matriks Penilaian SMM 1 IAPI. Persentase ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika profesional telah terintegrasi dalam sistem mana pun. Selain memenuhi persyaratan formal, KAP MNL juga menunjukkan komitmennya terhadap independensi dengan melakukan konfirmasi independensi setiap tahun dan pernyataan independensi untuk setiap penugasan, memastikan bahwa auditor tetap adil.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Kritzinger & Barac (2025), yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan SMM/ISQM 1 tidak hanya diukur oleh dokumen dan prosedur, tetapi juga oleh budaya mutu yang diinternalisasi oleh seluruh staf. Dengan menekankan fondasi budaya seperti profesionalisme, etika, dan pembelajaran, penelitian tersebut mendukung kesimpulan bahwa KAP MNL telah mengembangkan dasar etika yang kuat untuk pengendalian kualitas dan siap untuk mempertahankan kualitas audit yang berkelanjutan.

Pada point Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu, penilain mencapai tingkat pemenuhan 100% dengan perhitungan:

$$\frac{\text{hasil point yang didapatkan}}{\text{total point pada pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\% \dots\dots\dots (4)$$

Selama proses evaluasi dan pengecekan hubungan klien. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh prosedur pra-perikatan telah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut, ada penelaahan informasi klien, analisis risiko perikatan, dan penilaian kompetensi dan kapasitas tim audit. Tingkat pemenuhan yang luar biasa ini menunjukkan kesiapan KAP MNL untuk menerapkan SMM 1 secara teratur dan menunjukkan betapa efektifnya sistem penilaian perikatan dan pemilihan klien, yang merupakan pilar penting dalam menjaga kualitas audit.

Hasilnya sejalan dengan persyaratan yang dijelaskan dalam Panduan Implementasi Pertama Kali SMM 1, terutama paragraf A67-A74, yang menyatakan bahwa KAP harus melakukan penilaian menyeluruh sebelum menerima atau melanjutkan perjanjian. Dalam proses ini, informasi tentang integritas, tata kelola, dan prinsip etika diidentifikasi; penilaian kapasitas KAP internal; dan penerapan kebijakan tentang jenis perikatan yang dapat diterima. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai alat penyaringan awal yang melindungi auditor dari risiko menjadi bebas, memiliki konflik kepentingan, dan menerima tugas yang melampaui kemampuan mereka. Sebagai bukti kepatuhan penuh terhadap persyaratan tersebut, KAP MNL dinilai memiliki sistem pengendalian mutu yang kuat dan sesuai dengan SMM 1, yang memungkinkan audit yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Point Pelaksanaan Perikatan, Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa tingkat kesiapan KAP MNL dalam menerapkan ketentuan SMM 1 pada aspek pelaksanaan perikatan baru mencapai 68% dengan perhitungan:

$$\frac{\text{hasil point yang didapatkan}}{\text{total point pada pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{15}{22} \times 100\% = 68\% \dots\dots\dots(5)$$

Seperti yang ditunjukkan dari hasil perhitungan diatas, transisi menuju standar baru belum sepenuhnya terjadi karena sebagian besar mekanisme pengendalian mutu yang digunakan KAP MNL masih mengacu pada SPM 1. Ada perbedaan struktur antara SPM 1 dan SMM 1, yang lebih prinsipil dan berbasis risiko. SMM 1 mewajibkan KAP untuk menetapkan kebijakan pengendalian mutu dan memastikan bahwa proses tersebut beroperasi secara berkelanjutan dan dapat menunjukkan bukti operasional bahwa pengendalian mutu telah dilakukan dengan cara yang teratur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang budaya audit kualitas (AQC), pada penelitian Alberti *et al.* (2022) menegaskan bahwa budaya mutu organisasi berpengaruh kuat terhadap kualitas audit dan implementasi standar mutu seperti ISQM 1/SMM 1. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KAP MNL masih berada di fase transisi menuju implementasi penuh SMM 1, karena proses monitoring dan remediation di KAP MNL belum memberikan umpan balik yang cukup untuk mendukung perbaikan berkelanjutan sebagaimana dituntut oleh SMM 1. Oleh karena itu, agar kualitas perikatan terus meningkat dan sesuai dengan standar manajemen mutu yang berlaku, diperlukan peningkatan peran rekan perikatan dalam pengendalian mutu, supervisi berbasis risiko, dan pengembangan budaya mutu yang lebih kokoh.

Hasil penilaian pada point Sumber Daya menunjukkan bahwa kesiapan dokumentasi KAP MNL dalam memenuhi ketentuan SMM 1 berada pada tingkat 75%, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{hasil point yang didapatkan}}{\text{total point pada pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{21}{28} \times 100\% = 75\% \dots\dots\dots(6)$$

Perhitungan ini mencerminkan bahwa sebagian besar area pengendalian mutu telah memiliki dokumen dasar yang relevan. Area dengan nilai 1 menunjukkan kelengkapan dokumentasi yang sesuai standar, namun efektivitas pelaksanaan belum sepenuhnya konsisten akibat lemahnya supervisi dan penerapan kebijakan. Dominasi nilai 0,5 menandakan bahwa dokumen memang tersedia, tetapi belum sepenuhnya operasional atau selaras dengan ketentuan terbaru, terutama pada aspek pelatihan internal, evaluasi kinerja, orientasi personel eksternal, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan penyedia jasa. Meskipun tidak ada area yang bernilai 0—yang berarti seluruh elemen telah memiliki dokumentasi dasar—ketidaksesuaian pada nilai 0,5 menunjukkan perlunya perbaikan agar dokumen benar-benar dapat menjadi pedoman yang efektif.

Secara keseluruhan, capaian 75% menunjukkan bahwa KAP MNL berada pada tahap transisi menuju implementasi SMM 1 yang lebih komprehensif. Untuk mencapai mutu yang konsisten, diperlukan penyempurnaan kebijakan, penguatan prosedur teknis, peningkatan kualitas dokumentasi, serta penegasan kembali pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Harmonisasi antara dokumen, praktik, dan evaluasi menjadi penting agar sistem manajemen mutu berfungsi

secara optimal. Selain itu, peningkatan pelatihan, supervisi, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat kultur mutu dan memastikan kesiapan KAP MNL dalam menerapkan SMM 1 secara berkelanjutan.

Penilaian terhadap komponen sistem informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dokumentasi serta implementasinya masih berada pada level yang relatif rendah, yaitu sekitar 47% dengan penilaian:

$$\frac{\text{hasil point yang didapatkan}}{\text{total point pada pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{7}{15} \times 100\% = 47\% \dots\dots\dots(7)$$

Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan temuan pada area lain, sehingga menunjukkan bahwa aspek ini merupakan salah satu titik kritis dalam struktur manajemen mutu KAP MNL.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa area dengan nilai 1 hanya mencakup sebagian kecil elemen, terutama yang berkaitan dengan dokumentasi penggunaan pakar eksternal yang telah memenuhi standar dan didukung oleh panduan dan checklist yang memadai. Jumlah temuan bernilai tinggi menunjukkan bahwa ada mekanisme yang baik untuk memastikan keandalan informasi teknis dan hukum, tetapi sebagian besar elemen menerima nilai 0,5, yang menunjukkan bahwa dokumentasi sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya memadai atau tidak efektif. Pelatihan dan kebijakan komunikasi, saluran komunikasi internal, pencadangan data, dan pedoman komunikasi eksternal menunjukkan kelemahan ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun kebutuhan akan sistem informasi dan komunikasi yang efektif telah dipahami, implementasinya belum konsisten. Implementasi yang tidak konsisten berpotensi berdampak pada ketepatan, ketelitian, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas tim.

Temuan risiko tanpa nilai terlihat cukup signifikan, terutama untuk komponen dasar seperti penggunaan sistem informasi, uji keamanan data, pembaruan sistem, dan implementasi pencadangan data. Tidak adanya dokumentasi di bidang ini menunjukkan bahwa KAP MNL tidak memiliki mekanisme penting untuk menjaga integritas dan keamanan informasi, yang merupakan komponen penting dari kualitas audit. Tidak adanya kerangka pengendalian yang jelas meningkatkan risiko operasional seperti kehilangan data, kesalahan penyampaian informasi, atau kemungkinan kebocoran. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem komunikasi dan informasi harus menjadi prioritas utama. Penyampaian informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu dapat dicapai melalui penguatan kebijakan, penyusunan prosedur yang komprehensif, peningkatan pelatihan, dan harmonisasi antar-sistem dan saluran komunikasi.

Setelah menyelesaikan penilain pada dokumen KAP MNL dan mewawancarai tim audit yang terlibat, Rancangan SMM 1 yang terbaik untuk KAP MNL yang harus meningkatkan pada point Pelaksanaan perikatan; Sumber daya; dan yang terparah adalah pada aspek informasi dan komunikasi. Langkah ini menjadi fondasi dari seluruh proses dalam sistem manajemen mutu. Seperti yang dijelaskan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2024), pada tahun pertama mengimolementasikan standar ini harus berkaitan dengan SMM 2 dan SA 220. Pada Standar ini, KAP diminta untuk melakukan pengoperasian aktivitas pemanatauan yang akan berlaku pada 31 Desember 2025. Sistem mutu diawali

dengan penguatan kepemimpinan melalui komitmen pimpinan dan keteladanan dalam membangun lingkungan yang mendukung budaya mutu. Partner bertanggung jawab menetapkan arah kebijakan mutu melalui penunjukan Quality Leader, pembentukan komite mutu, serta penyusunan pernyataan nilai profesional sebagai tone at the top. Hal ini didukung oleh paragraf 53 dan A187 dari SMM 1 yang mengatakan:

“Setiap individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu harus mengevaluasi sistem manajemen mutu atas nama KAP. Evaluasi harus dilaksanakan pada suatu waktu, dan dilaksanakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun

Individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu dapat dibantu oleh individu lain dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, individu yang diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi atas sistem manajemen mutu tetap bertanggung jawab dan akuntabel atas pengevaluasian.” (Standar Manajemen Mutu 1, 2024)

Rancangan sistem pengendalian mutu audit disusun untuk memperkuat kecukupan sumber daya, tata kelola TI, serta metodologi audit yang digunakan oleh KAP. Pada aspek sumber daya, sistem memastikan kompetensi personel melalui pelatihan rutin dan penilaian berbasis matriks kompetensi yang telah difasilitasi oleh Toolkit SMM 1. Mengingat temuan signifikan pada sistem informasi, rancangan ini menekankan penguatan tata kelola TI melalui kebijakan keamanan data, pengendalian akses, pencadangan rutin, pembaruan sistem, serta dokumentasi perangkat lunak audit. Dari sisi metodologi, disediakan dukungan berupa template audit, pedoman penyusunan opini sesuai SA 700–706, serta standar dokumentasi berbasis SA 200 untuk memastikan konsistensi pelaksanaan perikatan.

Rancangan proses perikatan dipertegas melalui penyusunan Engagement Performance Manual yang mengatur seluruh tahapan audit, disertai mekanisme review berlapis dan checklist kepatuhan dokumentasi untuk menutup temuan sebelumnya. Pada aspek informasi dan komunikasi, rancangan menambahkan pedoman komunikasi internal–eksternal, mekanisme konsultasi dan eskalasi, serta pengembangan platform manajemen audit yang mencakup workflow digital, penyimpanan dokumen, dan audit trail. Pemantauan dan remediasi dirancang melalui inspeksi internal tahunan, evaluasi mutu berbasis risiko, serta dashboard pemantauan implementasi SMM 1. Seluruh kebijakan, prosedur, dan template didokumentasikan secara sistematis agar mudah diakses dan diperbarui. Secara keseluruhan, rancangan ini membentuk kerangka pengendalian mutu berbasis risiko yang bertujuan meningkatkan konsistensi, reliabilitas, dan kualitas hasil audit secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Manajemen Mutu 1 (SMM 1) pada KAP MNL masih sangat awal dan belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Beberapa elemen, seperti sumber daya manusia, metodologi audit, dan dokumentasi prosedur, sudah memiliki dasar kebijakan yang memadai, tetapi praktiknya belum konsisten. Karena sebagian besar kebijakan yang digunakan masih berbasis SPM 1, mereka tidak memenuhi tuntutan SMM 1, aspek lain seperti

sistem informasi dan komunikasi akan menjadi yang paling lemah. Hasil penilaian risiko menunjukkan perbedaan yang jelas. Nilai 1,00 menunjukkan kebijakan yang sudah sesuai tetapi belum diterapkan secara optimal; nilai 0,50 menunjukkan dokumen yang ada tetapi belum selaras atau cukup operasional; dan nilai 0 menunjukkan area yang belum memiliki kebijakan sepenuhnya, yang membutuhkan tindakan segera.

Penelitian ini membuat rancangan sistem pengendalian mutu berbasis SMM 1 yang berfokus pada perbaikan pelaksanaan perikatan, penguatan sumber daya, dan perbaikan sistem informasi dan komunikasi sebagai bagian yang paling penting. Kegagalan yang ditemukan terkait erat dengan transisi undang-undang. Pada tahun pertama penerapannya, KAP diharuskan untuk menyesuaikan sistemnya dengan SMM 2 dan SA 220 serta memulai aktivitas pemantauan pada 31 Desember 2025. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumentasi; konsistensi, integrasi sistem, dan efisiensi implementasi juga penting. KAP MNL akan memiliki kesempatan untuk menerapkan rencana yang diusulkan untuk meningkatkan keandalan audit, meningkatkan akuntabilitas, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap setiap perjanjian yang dilakukan.

REFERENSI

- Alberti, C. T., Bedard, J. C., Bik, O., & Vanstraelen, A. (2022). Audit Firm Culture: Recent Developments and Trends in the Literature. *European Accounting Review*, 31(1), 59–109. <https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1846574>
- Arens, A. s, Elder, R. j, & Bansley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance*. Pearson Education Limited.
- CNBC Indonesia. (2018, October 2). Disanksi OJK Soal Kasus SNP, Ini Pernyataan KAP Deloitte. *Cnbcindonesi*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181002122501-4-35669/disanksi-ojk-soal-kasus-snp-ini-pernyataan-kap-deloitte>
- CNBC Indonesia. (2019, June 28). Kemenkeu Beri Sanksi ke Auditor Garuda, Ini Lengkapnya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190628110341-17-81303/kemenkeu-beri-sanksi-ke-auditor-garuda-ini-lengkapnya>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2024). *Panduan Implementasi Pertama Kali Standar Manajemen Mutu 1* (Issue November). IAPI.
- Kritzinger, J. A., & Barac, K. (2025). Measuring an audit quality climate among employees. *International Journal of Auditing*, 29(1), 1–33. <https://doi.org/10.1111/ijau.12348>
- Lapitkaia, L. (2023). *Firm's risk assessment process as an component of the quality management system of an auditing firm*. 114–118. <https://doi.org/10.53486/icspm2023.15>
- Leung, Philomena., Coram, Paul., Cooper, B. J. ., Richardson, Peter., Canestrari-Soh, D., & Meredith, K. (2024). *Audit and assurance*. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Lubenchenko, O. E., Shulha, S. V., & Korinko, M. D. (2022). New Standards of Quality Management in Audit. The Risk-Based Approach. *Statistics of Ukraine*, 96(1), 117–126. [https://doi.org/10.31767/su.1\(96\)2022.01.11](https://doi.org/10.31767/su.1(96)2022.01.11)

-
- Nwaobia, A. N., Luke, O., & Theophilus, A. A. (2016). the New Auditors' Reporting Standards and the Audit Expectation Gap. *International Journal of Advanced Academic Research | Social & Management Sciences* |, 2(11), 2488–9849. www.ijaar.org
- Pisani, C. (2022). *The Implications of the Revised Audit Quality Management Standards on Local Audit Firms*. May.
- Standar Manajemen Mutu 1, Pub. L. No. Standar Manajemen Mutu 1 (2024). <http://www.iapi.or.id>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods Sixsth Edition*. SAGE Publications, Inc.